



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	24 (Duapuluh empat)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas, Direktur Pembinaan SLB Depdiknas, Direktur Kesetaraan Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag, serta Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag
Hari/Tanggal	:	Kamis, 1 Maret 2007
Pukul	:	14.15 – 16.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Heri Akhmadi/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Penjelasan mengenai penuntasan Wajib Belajar Tingkat SD/MI; 2. Lain-lain
Hadir	:	39 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir Pemerintah	:	Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas, Direktur Pembinaan SLB Depdiknas, Direktur Kesetaraan Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag, serta Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag beserta jajarannya

**CATATAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Heri Akhmadi, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas, Direktur Pembinaan SLB Depdiknas, Direktur Kesetaraan Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag, serta Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag memberikan penjelasan mengenai penuntasan Wajib Belajar Tingkat SD/MI dan dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan

saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /keepakatan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian SD/MI dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang disekapati tuntas pada tahun 2008, masih jauh dari target yang ada, baik dari sisi perluasan akses maupun peningkatan mutu.
2. Dari pemaparan masing-masing Direktorat di Depdiknas dan Depag yang menangani usia sekolah SD/MI, semakin meyakinkan bahwa penuntasan Wajar Dikdas pada tahun 2008, sulit dan pesimis akan tercapai.
3. Komisi X DPR-RI meminta Direktur TK/SD, Direktur Kesetaraan dan Direktur PLB Depdiknas dan Direktur Madrasah dan Direktur Pekapontren Depag, untuk melakukan konsolidasi mengenai strategi penuntasan wajar dikdas 2008 yang meliputi; (i) Sasaran dan pencapaian yang sudah maupun yang belum termasuk *unit cost* yang digunakan. Sehingga ada peta yang jelas penuntasan wajar dikdas 2008; (ii) keseragaman indikator pencapaian antara Depdiknas dan Depag untuk SD/MI menggunakan APM; (iii) proyeksi dan strategi penyelesaian target sampai 2008, menyusun skenario pesimis dan optimis; dan; (iv) kendala-kendala yang dihadapi baik struktur maupun teknis.
4. Hasil konsolidasi akan dilaporkan kembali dalam RDP tanggal 5 Maret 2007 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI.

III. Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB

**Jakarta, 1 Maret 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**

ttd

**HERI AKHMADI**

## CATATAN

### 1. Direktorat TK/SD :

Untuk mencapai kondisi baik untuk SD, masih harus dibangun 231.929 ruang kelas (RK)

Layanan pendidikan alternatif (SD dan nonformal) jumlah unit sekolah Wajar, mencukupi. Target APM 95 %

Pengembangan SD bertaraf nasional dan internasional, 75 % sarana sekolah memenuhi SNP. SNP baru 20.000 dari 140.000, bangunan baik, perpustakaan baik, laboratorium (alat-alat peraga) yang baik (Dit.TK/SD bertugas hanya menyiapkan sarana/prasarana, guru di PMPTK dan isi di Puskur). Posisi pada akhir 2006 sekitar 15 %, dan untuk tahun 2008 harus mencapai 85 %.

Untuk akhir 2006, posisi sekolah bertaraf internasional sudah mencapai 60 SSI, dan SSN sudah mencapai 15 % dari rencana 140.000 (kurang lebih 20.000 SSN).

Beasiswa untuk siswa SD (diluar skema BOS) kurang lebih 52.171 orang. Pembangunan perpustakaan akhir 2006, sudah mencapai 30 % atau 50.000 sekolah dan tinggal 10.000 yang belum ada perpustakaan.

### 2. Direktorat Kesetaraan PLS :

Untuk direktorat kesetaraan, Wajar Dikdas tuntas dengan APK 95 %.

Untuk penuntasan wajar dikdas paket A (DO di atas 3 tahun), menyumbang 0,4 % dari penuntasan wajar dikdas atau sebesar

Untuk tahun 2006, meluluskan 27.821 paket A dari target 102.016 orang. Sasaran paket A tahun 2008 sebesar 282.426 namun jika ditambah dengan DO 3 tahun 282.754 orang, maka totalnya mencapai 565.148 orang tuntas Wajar Dikdas 2008. Tahun 2007 sasaran 105.468 orang dan perkiraan lulusan 50.000

Dari sisi akses diperkirakan masih ada 900.000 orang yang harus dilayani oleh pendidikan kesetaraan pada tahun 2008.

### 3. Direktorat PLB :

Penyandang usia sekolah 317.016 orang (data BPS) (termasuk SMA) dan khusus SD/SMP kurang lebih 200.000 an ribu dan yang sudah dilayani sekitar 25 % (atau 55.000 orang).

SLB cacat 1.176 dan SMP 521 dan umumnya swasta (80%) dan dalam kondisi yang mengkhawatirkan (bangunan rusak) sedangkan yang negeri umumnya baik.

Sekolah inklusif masalahnya di akses yaitu alat-alat multi media, sarana/prasarana lainnya. Karena itu, didorong agar sekolah inklusif berada di daerah pedesaan.

Pendidikan layanan khusus adalah untuk daerah-daerah terpencil dan daerah bencana alam. Dan belum bisa dihitung (APK/APM), karena kegiatan ini baru pada tahun 2007.

Perlu ada upaya untuk mencetak guru-guru khusus yang terkait dengan pendidikan layanan khusus.

#### 4. Direktorat Madrasah Depag :

MI seluruhnya 23.517 (1.548 negeri dan selebihnya swasta), pada tahun 2006 mengubah kebijakan dengan lebih banyak memberi bantuan pada MI swasta yaitu 80 % berbanding 20 % (negeri). RK yang dalam keadaan rusak sekitar 25.016 atau sekitar 20 % dari total RK yang ada. Pada tahun 2007, dialokasikan 10.000 RK yang akan diperbaiki dan tahun 2008 dialokasikan lagi 15.016 RK.

Angka partisipasi kasar mencapai 13,7 % dan 2007 14,2 % dan rencana 2008 14,8 %.

Guru di MI berjumlah 195.898 orang dan yang sangat memprihatinkan sebagian besar tidak memenuhi kualifikasi dan hanya 30.917 yang memenuhi kualifikasi. Yang bisa disertifikasi baru mencapai 5.000 guru pada tahun 2007 (dari 30.917 guru).

Memberdayakan MI swasta, dan bantuan yang diberikan seluruhnya dalam bentuk *block grant*.

Untuk 2007, terdapat 10.680 yang dapat di up-grade kualifikasi pendidikannya.

Perpustakaan di MI setiap tahun dianggarkan 250 MI yang dibantu perpustakaan dan tahun 2007 sekitar 200 MI yang akan dibantu. Baru 7.000 dari 23.000 MI yang sudah memiliki perpustakaan, jadi baru mencapai 30 %. Dari jumlah tersebut kondisi bangunan

perpustakaan yang dalam keadaan rusak mencapai kurang lebih 11.000 perpustakaan.

Dari estimasi APK tahun 2008 yaitu 14,8 %, belum sesuai dengan porsi penuntasan wajar dikdas Depag sebesar di atas 15,2 %. Namun perlu dituntaskan juga APM nya, sebab indikator keberhasilan SD/MI menggunakan ukuran APM secara nasional.

5. Direktur Pekapontren Depag :

Pelaksanaan program Wajar Dikdas sampai 2006 meningkat tajam dari tahun 2005 sebesar 223.433 santri dan tahun 2006 sebesar 559.657 santri.

Sarana/prasarana menggunakan lokal-lokal yang sudah ada dan sumber daya (guru) yang sudah ada.

Munawar Sholeh :

Dengan pemaparan tadi, tampaknya penuntasan wajar dikdas 9 tahun pesimis dapat dicapai tahun 2008. Bagaimana mewujudkan pencapaian tersebut, strategi yang digunakan bagaimana ?

Ferdiansyah :

Sasaran dan pencapaian yang sudah maupun yang belum perlu dijelaskan kembali termasuk *unit cost* yang digunakan. Sehingga ada peta yang jelas penuntasan wajar dikdas 2008.

Perlu keseragaman indikator pencapaian antara Depdiknas dan Depag untuk SD/MI menggunakan APM

Nina :

Perlu ada konsolidasi internal baik di tingkat departemen maupun direktorat.

Simulasi pendataan pembagian persentase, akan lebih mudah mencapai APM yang ideal.

DAK untuk rehabilitasi sekolah, apakah sudah disosialisasikan ke daerah-daerah. Dan apakah memang DAK komitmen untuk rehab sekolah ?

A. Darodji :

Apakah masih ada perbedaan antara yang diterima guru SD dengan MI begitu juga dengan yang diterima siswa. Perlu ada unit cost yang sama antara Depag dan Depdiknas, agar indikator pencapaian secara umum dapat seragam.

Pembagian kerja antara Depdiknas dan Depag dan cara memenuhinya ?

Saidah Sakwan :

Pemetaan data anak usia sekolah